

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian yang menggunakan pendekatan gabungan yakni penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang melalui prespektif administrasi negara ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa;

1. Pembinaan narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang belum sesuai dengan tujuan sistem Pemasyarakatan hal ini disebabkan oleh kebijakan pembinaan narapidana korupsi mencakup ketatalaksanaan, substansi pembinaan dan perubahan perilaku yang belum sesuai dengan proses Pemasyarakatan dan kebutuhan narapidana korupsi. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan adalah ketiadaan regulasi dan kebijakan yang mengatur pola pembinaan khusus narapidana korupsi, instrumen dan ketatalaksanaan administratif yang belum progresif mendorong perubahan perilaku sebagai tujuan pembinaan dan terbatasnya kualitas pengetahuan dan pemahaman petugas terkait pembinaan yang sesuai kebutuhan narapidana korupsi. Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan terletak pada aspek ketatalaksanaan dan substansi kebaruan program pembinaan sedangkan aspek penentu dalam keberhasilan program terletak pada adanya perubahan perilaku yang sesuai dengan tujuan pemasyarakatan sekaligus merupakan wujud konkrit pembangunan manusia dalam konteks administrasi negara. Dengan demikian baik faktor pendukung maupun faktor penentu dalam penyelenggaraannya tidak dapat dipisahkan melainkan dilihat dalam satu kesatuan proses pemberdayaan yang berkesinambungan
2. Pemberdayaan dapat dijadikan model dalam pembinaan narapidana korupsi melalui penyempurnaan empat aspek pembinaan yakni *pertama*; memperkuat ketatalaksanaan pembinaan mencakup penelitian kemasyarakatan (Litmas), perencanaan pembinaan, pelaksanaan

pembinaan, penilaian pembinaan narapidana dan penghakhiran pembinaan. *Kedua*; Metode pemberdayaan narapidana memasukan substansi pembinaan yang lebih relevan, baik pada kegiatan kepribadian dan kemandirian. melalui penguatan kapasitas, penguatan psikologis dan penguatan partisipasi narapidana korupsi. *Ketiga*; Metode pemberdayaan menitikberatkan pada perubahan perilaku sebagai ukuran keberhasilan dari pembinaan narapidana korupsi dengan memasukan aspek perubahan perilaku (narapidana sebagai subjek) selain indikator keaktifan mengikuti kegiatan dan indikator tidak melanggar tata tertib (narapidana sebagai objek) dan *keempat*; pada aspek reintegrasi sosial metode pemberdayaan lebih mendorong narapidana korupsi untuk lebih sadar dan bertanggungjawab atas perbuatannya dengan melakukan tindakan tindakan aktif dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimilikinya melalui keberlanjutan program pembinaan yang dilakukan selama berada di bawah bimbingan Balai Pemasyarakatan

B. Saran

Ada 2 jenis saran yang teridentifikasi dalam penelitian ini yakni saran yang terkait dengan kebijakan, dan saran yang terkait dengan penelitian lanjutan. Adapun saran berdasarkan hasil penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penyesuaian muatan pengaturan kebijakan dan regulasi formal dalam peraturan perundang-undangan yakni :
 - a. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan ketatalaksanaan, substansi dan perubahan perilaku narapidana sesuai metode pemberdayaan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Mengacu pada penelitian ini metode pemberdayaan sebagai model pembinaan dapat diperluas implementasinya untuk tindak pidana lainnya tidak hanya narapidana korupsi namun diterapkan bagi

narapidana lainnya. Selain itu implementasi pemberdayaan narapidana ini tidak diskriminatif dan berprespektif gender sesuai peraturan perundang-undangan.

- b. Materi yang terkait dengan ketatalaksanaan pemberdayaan yang mencakup Penelitian Kemasyarakatan, Perencanaan Pembinaan, Pelaksanaan Pembinaan, Penilaian Pembinaan dan Pengakhiran Pembinaan perlu diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM serta diatur secara mendetail dari aspek ketatalaksanaan, aspek substansi pemberdayaan, dan aspek perubahan perilaku dalam Standar Operasional Prosedur Pemberdayaan Narapidana.
- c. Materi yang terkait dengan substansi program pembinaan yang mencakup program penguatan kapasitas dengan kegiatan optimalisasi kualifikasi, kompetensi dan modal narapidana korupsi, program penguatan psikologis melalui kegiatan pengembangan kemampuan intra personal, interaksional dan perilaku serta program peningkatan partisipasi melalui kegiatan pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan agar diatur secara terinci sebagai pola pembinaan narapidana korupsi yang dijadikan sebagai pedoman pembinaan narapidana korupsi di lembaga pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya narapidana korupsi ditempatkan sebagai subjek pembinaan bukan sekedar objek pembinaan.
- d. Perubahan perilaku narapidana menjadi tujuan dalam sistem pemasyarakatan oleh sebab itu substansi pengaturan yang terkait perubahan perilaku harus dinyatakan secara jelas dalam kebijakan dan regulasi dalam peraturan Pemerintah juga Peraturan Menteri Hukum dan HAM mencakup pengembangan kepercayaan diri, pemberdayaan diri dan orang lain, redifinisi diri dan peran, pengalaman dan perspektif baru, pola aksi baru, inovasi baru, implementasi kegiatan, pembelajaran dan pertumbuhan yang dijadikan sebagai indikator perubahan perilaku yang dapat diukur.

Oleh sebab itu perlu disusun instrumen perubahan perilaku narapidana korupsi berbasis metode pemberdayaan dalam peraturan dimaksud.

2. Agar metode pemberdayaan sebagai model pembinaan narapidana korupsi dapat diterapkan secara efektif dan berorientasi perubahan perilaku melalui proses pemberdayaan atau substansi pemberdayaan yang terdiri dari proses penguatan kapasitas, proses penguatan psikologis dan proses pengembangan partisipasi serta diselenggarakan melalui tata kelola dalam manajemen ketatalaksanaan, maka di Lapas Kelas 1 Tangerang diperlukan pembenahan yang terkait dengan:

- Organisasi dan tata laksana pada lembaga pemasyarakatan, sehingga akan jelas dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing tahapan pelaksanaan pemberdayaan sebagai model pembinaan narapidana korupsi.
- Sumber daya manusia atau petugas pemasyarakatan yang memiliki kualifikasi keahlian dan kompetensi yang memadai untuk menyelenggarakan model pembinaan narapidana korupsi.
- Disposisi yang merupakan komitmen dan respon pelaksana kebijakan yang mengetahui dan memahami apa yang akan dilakukan untuk melaksanakan metode pemberdayaan sebagai model pembinaan narapidana korupsi .
- Komunikasi merupakan faktor sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan metode pemberdayaan sebagai model pembinaan untuk mewujudkan perubahan perilaku narapidana korupsi.

3. Terkait dengan penelitian lanjutan kedepan dalam prespektif pemberdayaan sebagai model pembinaan tentu saja masih diperlukan pendalaman;

- a. Penelitian pada aspek keorganisasian diantaranya mencakup kualifikasi dan kompetensi sumber daya petugas pembinaan, program bimbingan lanjutan di Bapas dan kontek bimbingan

klien narapidana korupsi dan bagaimana pola pengintegrasianya dengan masyarakat termasuk penyempurnaan kebijakan dan tata kelola di level *after care* pasca narapidana menyelesaikan proses bimbingan kemasyarakatan.

- b. Penelitian mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pemberdayaan narapidana korupsi agar lebih efektif dan efisien dalam penerapannya. Sebagaimana diketahui bersama latar belakang filosofis Pemasyarakatan di bangun atas dasar kesejahteraan manusia dengan latar belakang keterbatasan ekonomi, oleh sebab penting untuk melakukan penelitian etnografi guna mendalami kembali filsafat pemasyarakatan sesuai dengan perkembangan kekinian karena saat ini kejahatan dilakukan tidak semata karena alasan ekonomi tetapi alasan eksistensi dan ideologi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aamodt, Michael G. (2010). *Industrial / Organizational Psychology* (6th edition). USA: Wadsworth Cengage Learning.
- Achjani Z, Eva. (2011). *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung.
- Adimihardja, Kusnaka and Hikmat, Harry. (2003). *Participatory Research Appraisal: Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Anwar Sanusi dan Fadillah Putra. (2022). *Analisis Kebijakan Publik Neo-Institusionalisme*. Depok: Penerbit LP3ES
- Aprillia Theresia, et. al. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Atmasasmita, Romli. (1982). *Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai*. Bandung: Armico.
- Baharmi. (2010). *Narapidana 973 Hari; Menguak Kehidupan di Balik Penjara*, Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka.
- Bahaudin, Taufik. (2019). *Brainware Management: Manajemen Manusia Generasi 5.0 Menjawab Tantangan Disruptif Pada Abad Otak dan Millenium Pikiran di Abad XXI*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Basuki, Johanes. (2018). *Administrasi Publik Telaah Teoritis dan Empiris*. Depok: Rajawali Pers.
- Byrne, B. M. (2010). *Structural Equation Modelling with AMOS: Basic Concepts, Application, and Programming (2nd edition)*. New York: Taylor and Francis Group.
- Byrne, B.M. (2010). *Structural Equation Modeling with AMOS: Basic Concepts, Applications, and Programming (2nd edition)*. New York: Roulledge Taylor & Francis.
- Chowdhury, Subir, et. al. (2000). *Management 21C*. Great Britain: Pretince Hall.
- Creswell, John C. (1994). *Research Design: Quantitative &Qualtitative Approaches*. London: Sage Publication.
- Creswell, John C, (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Metods Approaches*. London: Sage Publication.
- Dunn, N. William, (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Inc.
- Ferdinand, A. (2014). *Structural Equation Modeling Dalam Penelitian Manajemen*. Semarang. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Gildenhuis, J. S. H. (2004) *The Philosophy of Public Administration: A Holistic Approach*. Stellenbosch: SUN PRESS.
- Hair, J F., et. al. (2010). *Multivariate Data Analysis* (7th edition). New Jersey: Pearson Education International.
- Hassan, Iqbal. (2002). *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Helmi, Masdar. (1973). *Dakwah dalam Alam Pembangunan*. Semarang. Toha Putra
- Irawan, Prasetya. (2006). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Depok: Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Islamy, Irfan (2002). *Prinsip Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Josias A., Simon R. (2012). *Budaya Penjara: Pemahaman dan Implementasi*. Bandung: Karya Putra Darwati.
- Kline, R.B. (2011). *Principles and Practice of Structural Equation Modeling* (3rd edition). London: Guilford Press.
- Koenig, David. L. (2020). *Governance Reimagined; Organizational Design, Risk, And Value Creation*. Jakarta: PT Grasindo.
- Larry J. Siegel and Joseph J. Senna. (2007). *Essentials of Criminal Justice, USA*: Thomson Learning Inc.

- Loehlin, J. C. (2004). *Latent Variable Modeling 4th: an Introduction to factor, path, and structural equation analysis*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Association.
- Magniz, Franz Suseno. (1988) . *Etika Politik*. Jakarta : Gramedia.
- Mangesti, Yovita A. and Tanya, Bernard. L. (2014). *Moralitas Hukum*. Bantul: Genta Publishing.
- Mardikanto, Totok and Soebianto, Poerwoko. (2003). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Maruyama, G. M. (1997). *Basics of Structural Equation Modeling*. London: Sage Publication.
- Mulaik, S. (2009). *Linear Causal Modeling with Structural Equations*. London: CRC Press.
- Muller, R. O. (1996). *Basic Principles of Structural Equation Modeling: An Introduction of Lisrel and EQS*. New York: Springer.
- Nugraha, Safri, et. al. (2007). *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Center for Law and Good Governance Studies FH UI.
- Pasaribu, Simanjuntak B.I.L, (1990). *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*. Bandung. Tarsito
- Poerwadarminta, W. J. S. (1982). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Putra, Fadillah and Sanusi, Anwar. (2019). Analisis Kebijakan Publik Neo-Institusionalisme Teori dan Praktik. Depok: LP3ES.
- Rappaport, Julian. (1984). Studies in Empowerment: Introduction to the Issue. New York: The Haworth Press.
- Raykov, T. and Marcoulides, G. A. (2006). A First Course in Structural Equation Modeling (2nd edition). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
- Sahardjo. (1994). Pohon Beringin Pengayoman. Pidato Penghargaan gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia, Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehakiman.
- Sahya, Anggara and Sumantri. (2016). Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Sani, Arsul. (2018). Catatan Dari Senayan; Menuju Konvergensi Hukum, HAM, dan Keamanan Nasional. Jakarta: Graha Pena.
- Schumacker, R. E and Lomax, R.J. (2010). A Beginner's Guide Structural Equation Modeling (3rd edition). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
- Shammas, Victor. L. (2017). Pains of Imprisonment: The Encyclopedia of Corrections. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Snarr, Richard W. (1996). Introduction to Corrections. New York: Brown & Benchmark Publishing.

- Soeharso, Y. Silverius and Tripomo. Tedjo. (2020). Soft Competencies Industry 4.0; Strategi Menyiapkan SDM Unggul di Era Disrupsi. Yogyakarta: Lautan Pustaka.
- Soerjobroto, Bahroedin. (2006). Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- Soerjowinoto, Petrus. (2017). Ilmu Hukum Suatu Pengantar. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
- Sudirman, Dindin. (2015). Permasalahan Yang Dihadapi Pemasyarakatan”, Refleksi 50 Tahun Sistem Pemasyarakatan; Anatomi Permasalahan dan Upaya Mengatasinya. Jakarta: Center for Detention Studies.
- Sujatno, Adi. (2008). Pencerahan di Balik Penjara: Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri. Jakarta: Teraju.
- Sunyoto Munandar, Ashar. (2001). Psikologi Industri dan Organisasi. Jakarta: UI-Press.
- Theresia, Aprilia. (2014). Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung: AlfaBeta
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (2018). Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (2004). Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance Dan Perwujudan Masyarakat Madani, Jakarta Lembaga Administrasi Negara: LAN

Umar, Nasaruddin and Fahri Bachmid. (2020). Efektivitas Program Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara terhadap Narapidana Khusus Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

Wibowo, Istiqomah, et. al. (2011). Psikologi Komunitas. Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi.

Publikasi Pemerintah :

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2009. Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, Jakarta.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2002. Bunga Rampai Pemasyarakatan; Kumpulan Tulisan Bahrudin Surjobroto, Jakarta.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2015. Standar Pembinaan Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan, Jakarta.

Lembaga Administrasi Negara RI, 2021 “ Modul Manajemen Risiko Pelatihan Kepemimpinan Administrator:, Jakarta, LAN RI

Ombudsman Republik Indonesia. 2020. Menemukan Mal-administrasi di Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan, Jakarta.

Partnership for Governance Reform. 2007. Menunggu Perubahan Dari Balik Jeruji; Studi Awal Penerapan Konsep Pemasyarakatan, Jakarta: Kemitraan.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 2017. Roadmap for The Development of Prison Based Rehabilitation Programmes, Vienna: Criminal Justice Handbook Series.

United Nations Office For Project Service (UNOPS), 2016. Technical Guidance For Prison Planning, Copenhagen: Technical and Operational Considerations Based On The Standard Minimum Rules for The Treatment Of Prisoners (The Nelson Mandela Rules)

Jurnal

Abdullah, Rahmat H. 2015. "Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan", *Fiat Justitia, Jurnal Ilmu Hukum*, 9, (1), 49-60.

Agner J, Braun K. 2018. "Patient Empowerment: A Critique of Individualism and Systematic Review of Patient Perspectives", *Patient Education and Counseling Journal*

Allah, Hedayat N and Redzuan, Ma'rof. 2009. "Participation as a Medium of Empowerment in Community Development", *European Journal of Sciences*, 11, (1), 170-176.

Bahrum, (2013), " Ontologi, Epsitemologi dan Aksiologi", *Jurnal Sulesana*, 8, (2)

Cohen, John and Uphoff, Norman, T. 1980. "Participation's Place In Rural Development: Seeking Clarity Through Specificity", *Elsevier B.V, World Development*, 8, (3), 213-235.

Dessy Debrilianwati W, Choirul Saleh, Minto Hadi. 2013. "Peran dan Koordinasi Antar Instansi Dalam Pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan di

- Lembaga Pemasyarakatan (studi tentang Program Kemandirian Pelatihan Kerja Pengelolaan Ikan Air Tawar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1, (2), 174-180.
- Dhanang, Dimas Sutawijaya. 2020. ”Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibirong”, *Jurnal Gema Keadilan*, 7, (2), 84-96.
- Erina Suhestia Ningtyas, Abd. Yuli Andi Gani, Sukanto. 2013. “Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Lowokwaru Kota Malang)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1, (6), 1266-1275.
- Evan, et. al. 2017. “Education in Prison and the Self-Stigma: Empowerment Continuum”, *Crime & Delinquency Journal*, 1–26.
- Gulo, Nimerodi. 2019. ”Meninjau Ulang Sistem Pembinaan Narapidana Korupsi di Indonesia, Jurnal”, *LEGALITA*, 1, (1), 33-45.
- Halvorsen, Kristin, et. al. 2020. “Empowerment in healthcare: A thematic synthesis and critical discussion of concept analyses of empowerment”, *Patient Education and Counseling Journal*, 1263-1271.
- Hamja, H. 2015. “Model pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Base Correction) Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada*, 27, (3), 445-458.

- Hariadi, Agus. 2016. "Suatu Dilema Dalam Pembinaan Narapidana Koruptor di Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13, (3), 297-308.
- Hartworth, Christopher. 2020. "Coproduction, participation and empowerment: A participatory evaluation of a young care leavers project in prison", *Probation Journal*, 68, (1), 107-115.
- Herdiana, Dian. 2019. "Kecenderungan Perilaku Koruptif Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa", *Matra Pembaruan, Jurnal Inovasi Kebijakan*, 3 ,(1), 1-11 doi: 10.21787/mp.3.1.2019.1-11.
- Jean, Jehuda, Mongan, S. 2019. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Indonesia", *Indonesia Treasury Review, Jurnal Perbendaharaan Negara*, 4, (2), 163-176, doi: 10.33105/itrev.v4i2.122.
- Johan, Bahder Nasution, 2014, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", *Jurnal Yustisia* 3, (2) hal. 118 - 129
- Konger, A. Jay and Kanungo, Rabindra N. 1988. "The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice", *Academic Of Management Review*, McGill University, 13, (3), 471-482.
- Maani, Karjuni Dt. 2011. "Teori Aktor dalam Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Demokrasi*, 10, (1), 53-65.

- Melisa, Cecep Darmawan and Sunatra. 2015. "Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Untuk Mengembangkan Watak Kewarganegaraan (Civic Disposition)", *Jurnal Civicus Universitas Pendidikan Indonesia*, 15, (1).
- Nederveen, Jan Pieterse. 1998. "My Paradigm or Yours? Alternative Development, Post Development, Reflexive Development", *Development and Change*, 29, 343-373.
- Noor, Munawar. 2011. "Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah CIVICS*, 1 (2), 87-99.
- Notoatmodjo, S. 2017. *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, Edy. 2015. "Tinjauan Atas Kebutuhan Khusus Bagi Narapidana Kasus Korupsi di Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 5, (1), 71-80.
- Nuswantoro, Patriandi. 2017. "Pembinaan Mental Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Aceh Tengah", *Biram Samtani Sains, Universitas Gajah Putih*, 1, (3), 1-16.
- Perkins D., Douglas and Zimmerman, Marc A. 1995. "Empowerment Theory, Research, and Application", *American Journal Of Community Psychology*, 23 (5), 569-578.
- Quinn, Robert E. and Spretzer, Gretchen M. 1997. "The Road to Empowerment: Seven Questions Every Leader Should Consider," *Organizational Dynamics*, 26, (2), 37-49.
- Rahayu, Sri Wilujeng, (2013), " Filsafat, Etika dan Ilmu: Upaya Memahami Hakikat Ilmu dalam Konteks Ke Indonesiaan", *Humanika*, 17, (1), 79 -90

- Schalock, Robert L. 2000. "Three Decades Of Quality of Life", Focus On Autism and Other Developmental Disabilities, 15, (2), 116-127.
- Septiyuslianisa. 2014."Pembinaan Pegawai dalam Pelaksanaan Tugas di Biro Umum Kantor Gubernur Sumatera Barat, Jurnal Administrasi Pendidikan, Bahana Manajemen Pendidikan 2, (1), 682-831
- Sinaga, Edward J. 2019. "Aktualisasi Tata Nilai 'PASTI' Dalam Mewujudkan Wilayah Bebas Dari Korupsi Serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani", Pusat Pengkajian dan Pengembangan Hukum dan HAM, 13,(1) , 31-50.
- Spreitzer, Gretchen M; De Janasz, Suzanne C; Robert E. Quinn. 1999. "Empowered to lead: The role of psychological empowerment in leadership", Journal of Organizational Behavior, 20, (4), 511-526.
- Suhestia, Erina N, et. al. 2013. "Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Lowokwaru Kota Malang)", Jurnal Administrasi Publik, 1, (6), 1266-1275.
- Sulistiyorini, Nur Rahmawati, et. al. 2015. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug", Share Social Work Jurnal, 5, (1), 71-80.
- Swartz, Louis H. 1967. "Punishment and Treatment of Offenders", Buffalo Law Review, University at Buffalo School of Law, 16, (2), 368-376.
- Waluyo, Bambang. 2014. "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia", Jurnal Yuridis, 1, (2), 169-182.

Widjayanti, Kesi. 2011. "Model Pemberdayaan Masyarakat", Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 12, (1), 15-27.

Woodyatt, Lydia and Wenzel, Michael. (2014). "A Need Based Perspective On Self Forgiveness: Addressing Threat to Moral Identity as a Means of Encouraging Interpersonal and Intrapersonal Restoration", Journal Of Experimental Social Psychology, 50, 125-135.

Zimmerman, Marc A. and Warschausky, Seth. 1998. "Empowerment Theory for Rehabilitation Research: Conceptual and Methodological Issue", Rehabilitation Psychology University of Michigan, 43, (1), 3-16.

Makalah

Chamber, Robert. 1994. "Paradigma Shift and The Practice of Participatory Research and Development", Institute Of development Studies, Working Paper 2

Dusselsorp, Van D.B.W.M. 1981. "Participation in Planned Development Influenced by Governements of Developing Countries At Local Level in Rural Areas", Departement Of Rural Sociology in the Tropics and Sub Tropics Agricultural University, Wageninge, The Netherlands.

Melisa. 2014. "Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Untuk Mengembangkan Watak Kewarganegaraan (civic education), (studi kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung)", Thesis Universitas Pendidikan Indonesia.

Velinka Grozdanić & Ute Karlavaris-Bremer. 2007. "A Written Word from Women's Prison in the Function of Resocialization". Laporan Hasil Penelitian. University of Rijeka, Rijeka.

Internet

Mata-Mata Politik. 2020. Skandal Penjara Mewah Khusus Koruptor Indonesia Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin. Online. ([https://www.matamatapolitik.com/skandal-penjara-mewah-khusus-koruptor-indonesia-Lembaga Pemasyarakatan-sukamiskin/](https://www.matamatapolitik.com/skandal-penjara-mewah-khusus-koruptor-indonesia-Lembaga_Pemasyarakatan-sukamiskin/)). Diakses 19 April 2021.

Bachtiar, Absal. 2021. Belanda Kekurangan Narapidana? Penjara Banyak Ditutup. Online. (<https://zonaintegritas.news/mengapa-belanda-kekurangan-Narapidana-penjara-banyak-ditutup/>). Diakses 19 April 2021.

Yozami, M. Agus 2019. Pemerintah Berencana Buat Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narapidana Korupsi di Pulau Terpencil. Online. (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d08d3a75dd8c/pemerintah-berencana- uat-Lembaga Pemasyarakatan-khusus-Narapidana-korupsi-di-pulau-terpencil/>). Diakses 18 April 2021.

Sani, Ahmad Faiz Ibnu. 2019. Mulai Tahun Ini, Narapidana Korupsi Diusahakan Dibui di Nusakambangan. Online. (<https://nasional.tempo.co/read/1200826/mulai-tahun-ini-Narapidana-korupsi-diusahakan-dibui-di-nusakambangan>). Diakses 17 April 2021.

- Nuraya, Nidia. 2018. Kemendikbud Alokasikan Rp 100,13 Miliar untuk Bangun SD. Online
(<https://republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/18/10/28/phb8kk383-kemendikbud-alokasikan-rp-10013-miliar-untuk-bangun-sd>). Diakses 17 April 2021.
- DW. 2021. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok ke Ranking 102. Online
(<https://www.dw.com/id/transparency-international-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-anjlok-ke-ranking-102/a-56372181>). Diakses 8 April 2021.
- Ramalan, Suparjo. 2021. Nah Kan! Kasus Asabri Jadi Korupsi Terbesar di Indonesia. Online. (<https://ekbis.sindonews.com/read/338482/34/nah-kan-kasus-asabri-jadi-korupsi-terbesar-di-indonesia-1613566923>). Diakses 7 April 2021.
- Tamtomo, Akbar Bhayu. 2020. Infografik: 7 Kasus Korupsi dengan Kerugian Terbesar di Indonesia. Online.
(<https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/18/090500465/infografik-7-kasus-korupsi-dengan-kerugian-terbesar-di-indonesia>). Diakses 7 April 2021.
- Yuniarto, Topan. 2018. Budaya Suap Mencengkeram Lembaga Pemasyarakatan. Online.
(https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/201807/48ee4ccdca_80fb0e5108.pdf). Diakses 8 April 2021.

Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2014. The History of Utilitarianism. Online.
(<https://plato.stanford.edu/entries/utilitarianism-history/#JohStuMil>).
Diakses 4 Februari 2021.

Oxford Learner's Dictionaries.
Online.(<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/empowerment?q=empowerment>). Diakses 4 Februari 2021.

Panduan Manajemen Risiko,. https://www-coso-org.translate.goog/guidance-erm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc&_x_tr_hist=true,
diakses 12 Oktober 2023

https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No54/No54_27PA_Boriboonthana.pdf